

DINAMIKA POLITIK DINASTI: PETA KEKUATAN POLITIK LOKAL DI BANTEN PASCA PILKADA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Rahmat Sufajar¹, Yusuf Wibisono², Thomas Rizki Ali³

^{1,2,3}Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: rahmat.sufajar@civitas.unas.ac.id

Abstrak

Dinasti politik dianggap bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga muncul pandangan bahwa larangan untuk keluarga petahana merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi Negara. Kasus politik dinasti di Provinsi Banten menunjukkan 2 (dua) pola pewarisan kekuasaan, yakni pola *by design* yang dilakukan oleh Dinasti Ratu Atut Chosiyah dan Dinasti Achmad Dimiyati Natakusumah dengan pola *by accident*. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab isu penelitian mengenai praktik dinasti politik di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Ratu Atut Chosiyah serta di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Achmad Dimiyati Natakusumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontestasi Pilkada Banten 2024 memperlihatkan bahwa politik dinasti bukanlah kekuasaan absolut tunggal, melainkan suatu arena persaingan antar-dinasti yang terus beradaptasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, kelangsungan politik dinasti menjadi masalah serius bagi pembangunan politik di Indonesia, khususnya dalam menjamin kualitas demokrasi lokal yang lebih terbuka dan partisipatif.

Kata Kunci: *Dinasti Politik, Politik Daerah, Pilkada, Banten*

Abstract

Political dynasties are considered to be able to lead to power, but there is also a view that the prohibition for incumbent families is a violation of human rights and contrary to the State constitution. The case of dynastic politics in Banten Province shows 2 (two) patterns of power inheritance, namely the by design pattern carried out by the Ratu Atut Chosiyah Dynasty and the Achmad Dimiyati Natakusumah Dynasty with a by Accident pattern. This study applies a qualitative method with a descriptive-analytical approach that aims to explain and answer research issues regarding the practice of political dynasties in Banten Province carried out by Ratu Atut Chosiyah and in Pandeglang Regency carried out by Achmad Dimiyati Natakusumah. The results of this study indicate that the 2024 Banten Pilkada Contest shows that dynastic politics is not a single absolute power, but rather an arena of competition between dynasties that continues to adapt according to social, economic, and religious dynamics. Therefore, the division of political dynasties is a serious problem for political development in Indonesia, especially in ensuring the quality of more open and participatory local democracy.

Keywords: *Political Dynasties, Regional Politics, Pilkada, Banten*

A. PENDAHULUAN

Sejatinya negara demokrasi harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya bersifat inklusif. Akan tetapi, kenyataannya, kemunculan politik dinasti telah menghalangi partisipasi

masyarakat akibat status atau hak sosialnya yang sangat berbeda dari keluarga yang sedang menjabat (Gunanto, 2020). Perkembangan dinasti politik sering menimbulkan perdebatan. Secara umum, dinasti politik dianggap dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, namun juga muncul pandangan bahwa larangan bagi keluarga yang sedang berkuasa adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melanggar konstitusi negara (Gunanto, 2020).

Hal itu mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menunjukkan kecenderungan untuk menjadi herediter, meskipun posisi politik dapat diakses oleh semua, posisi keluarga penguasa akan diberi berbagai keuntungan (Synder, 2009). Demokrasi dipahami sebagai kekuasaan politik atau pemerintahan di mana rakyat berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, maka eksistensi dinasti politik telah menimbulkan pragmatisme politik dengan mendorong keluarga kepala daerah untuk menjabat sebagai pejabat publik. Fenomena politik dinasti ini sebelumnya telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa larangan bagi anggota keluarga kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah inkonstitusional, sehingga praktik politik dinasti tetap berlanjut hingga kini (Khairi, 2022).

Dalam sebagian besar kasus Pemilukada di Indonesia, biasanya terdapat dinasti politik yang bersifat keluarga atau familisme yang dilakukan baik secara kebetulan maupun sengaja di berbagai kabupaten/kota. Model secara tidak sengaja merupakan kerabat yang diusungkan sebagai calon kepala daerah hanya untuk menjadi bayangan dari kerabat lain yang dianggap lebih unggul dalam memenangkan Pemilukada. Sementara model secara desain sangat menekankan istri yang mengambil alih peran suami atau anak yang menggantikan posisi ayah (Djati, 2013). Model pemerintahan dinasti politik setelah otonomi daerah terlihat di Provinsi Banten. Syarif Hidayat (2007) dalam Wasisto Rahardjo menekankan bahwa dinasti politik Banten ini terbentuk melalui aliansi klan politik, monopoli ekonomi, kekerasan, dan lain-lain. Keadaan ini sangat mirip dengan klan Ampatuan yang ada di daerah Mindanao Selatan, Filipina, di mana anggota keluarganya memiliki posisi publik yang berpengaruh dan telah berakar lebih dari 200 tahun. Kasus dinasti politik Banten adalah contoh utama dinasti politik yang direncanakan secara khusus oleh para keluarganya untuk memasuki dunia politik.

Dinasti politik Banten telah berdiri teguh seiring dengan usia Provinsi Banten, sehingga jaringan kekuasaan telah tersebar dengan kuat di pemerintahan. Dengan kata lain, rancangan dinasti politik Banten memiliki warna aji mumpung dengan memanfaatkan kekuasaan keluarga. Dinasti politik Banten dimulai dari sejumlah pengaruh seperti ekonomi, sosial-budaya, agama, dan tentunya politik. Dilihat dari latar belakang sejarahnya, Tubagus Chasan Sohib bersama “kelompok Rawu”-nya yang sesungguhnya adalah sebutan untuk area pasar di Kota Serang. Namun, dalam pandangan masyarakat Banten, Rawu merujuk pada kelompok usaha atau dinasti keluarga Chasan Sohib. Chasan Sohib berperan sebagai tokoh utama dalam berbagai bidang seni budaya pencak silat, organisasi ulama, serta menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten. Selanjutnya, usaha untuk membangun dinasti politik dilakukan dengan menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama 2 (dua) periode, yang kemudian diikuti oleh anak, menantu, serta cucunya yang menjabat sebagai pejabat di tingkat eksekutif dan legislatif (Djati, 2013).

Akhirnya, Ratu Atut Chosiyah terjerat kasus korupsi yang melibatkan juga adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, yang dituduh melakukan pencucian uang. Di bulan Juli 2017, Ratu Atut menerima hukuman tambahan 5 tahun 6 bulan penjara plus denda senilai 16 ribu US Dollar atau 250 Juta Rupiah terkait keterlibatannya dalam kasus proyek pengadaan medis di Banten tahun 2012 (The Jakarta Post, 2017). Meskipun Ratu Atut telah menerima hukuman

penjara, usaha untuk mempertahankan politik dinasti masih berlanjut. Andika Hazrumy, putra Ratu Atut, terpilih sebagai Wakil Gubernur Banten untuk periode 2017 – 2022 mendampingi Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Selain itu, Airin Rachmi Diany juga diprediksi akan mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Airin adalah istri Tubagus Chaeri Wardana dan menantu Ratu Atut. Menguatnya polaritas agama dalam dinamika politik dinasti Banten sering dimanfaatkan oleh para penerus dinasti untuk memperkuat jaringan politik dan basis pemilih dalam menghadapi pemilu. Namun, setelah Ratu Atut tidak lagi terlibat dalam politik di Banten, dinasti Ratu Atut menghadapi berbagai rintangan—akibat munculnya dinasti-dinasti politik yang berusaha membatasi kekuasaan dinasti Ratu Atut.

Dalam konteks lokal, romantisasi nama besar familisme memastikan bahwa suatu dinasti politik dapat bertahan secara berkelanjutan. Familisme terbentuk dari tiga elemen, yaitu figur (personalism), klientelisme (clientelism), dan tribalisme (tribalism), yang merupakan kunci utama dalam memahami dasar-dasar munculnya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia (Djati, 2013). Hal itu yang menjadi contoh kebetulan dari dinasti politik Dimiyati Natakusumah. Tidak seperti Ratu Atut yang memiliki garis keturunan langsung dari ayahnya Tubagus Chasan Sohib, Achmad Dimiyati Natakusumah sejak lama menjadikan kiai Abuya Dimiyati sebagai teladan dan agen sosial dalam mendirikan dinasti politik di Kabupaten Pandeglang. Kharisma Abuya Dimiyati juga dirasakan oleh Achmad Dimiyati Natakusumah yang berhasil terpilih sebagai Bupati selama dua periode, kebijakan yang cenderung melestarikan peranan agama dalam kehidupan sosial masyarakat Pandeglang menjadikannya sebagai kekuatan dalam dunia politik (Hikmawan, 2021).

Dengan adanya struktur kekuasaan yang melibatkan pemimpin agama terkemuka, hal ini membuat kebijakan-kebijakan di daerah Pandeglang bersifat populistik terkait simbol-simbol keagamaan. Dengan demikian, kondisi politik klientalistik yang dibentuk oleh Achmad Dimiyati Natakusumah setidaknya berhasil mengamankan posisi-posisi dinastinya dalam struktur politik daerah. Dalam pemilihan legislatif 2019, Achmad Dimiyati Natakusumah dan anaknya Rizki Aulia Rahman Natakusumah berhasil menjadi Anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Dapil serta partai masing-masing. Selain itu, juga mempertahankan kekuasaan istrinya, Irna Narulita, yang menduduki jabatan Bupati Pandeglang selama 2 (dua) periode sejak 17 Februari 2016. Selanjutnya, dalam Pemilihan Bupati Pandeglang, Achmad Dimiyati sukses memenangkan saudaranya, Raden Dewi Setiani, sebagai Bupati Pandeglang pada pemilu 2024. Sementara itu, Achmad Dimiyati Natakusumah juga berhasil meraih kemenangan dalam mendampingi Andra Soni pada Pilgub Provinsi Banten Tahun 2024.

Airin Rachmi Diany sebagai penerus dinasti politik Ratu Atut harus menerima kekalahan dari dinasti politik yang secara bertahap dibentuk oleh Achmad Dimiyati Natakusumah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada penguasa sentral di Banten, peta politik kekeluargaan menjadi semakin terbuka dan dinamis dalam persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024, terdapat 2 (dua) pasangan calon, yaitu Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi berhadapan dengan Andra Soni serta Achmad Dimiyati Natakusumah. Menjelang Pilgub Banten 2024, survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 15-20 Juni 2024 menunjukkan bahwa Airin berada di urutan teratas dengan 38,3 persen, diikuti oleh Wahidin Halim 18,1 persen, Rano Karno 16,5 persen, Arif Wismansyah 6,9 persen, Irna Narulita 3,7 persen, Achmad Dimiyati 2,7 persen, dan Ahmed Zaki Iskandar 2,7 persen (Hutajuju, 2024).

Airin tetap menjadi favorit utama masyarakat Banten, sehingga hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan dan ketertarikan masyarakat terhadap Dinasti Politik Ratu Atut masih sangat tinggi. Sementara itu, Achmad Dimiyati masih tertinggal jauh dari Airin dengan 2,7 persen, dan istrinya Irna Narulita sebesar 3,7 persen. Dengan kata lain, jika

Pemilukada diadakan pada Juni 2024, Airin Rachmi Diany akan menjadi pemenang Pemilu. Namun, hal itu kontras dengan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Airin Rachmi Diany, yang didukung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan bersama wakilnya Ade Sumardi, harus menerima kekalahan dengan pengumpulan suara 44,12%. Di sisi lain, Andra Soni yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus bersama wakilnya Achmad Dimiyati, berhasil memenangkan kontestasi dengan total suara 55,88%. Kemenangan Achmad Dimiyati membuka peluang bagi dirinya untuk membentuk politik dinasti yang menjadi kompetitor dari dinasti Ratu Atut, sekaligus mengambil pengaruh dinasti Ratu Atut setelah sekian lama menghegemoni masyarakat Banten.

B. TINJAUAN PUSTAKA (bold 12 pt)

Konsep dinasti politik diterapkan melalui 3 (tiga) jenis familisme. Pertama, menurut Garzon (2002) adalah familisme (familism), yakni dinasti politik yang sepenuhnya berlandaskan pada hubungan darah langsung dengan keluarga (consanguinity) dan hubungan pernikahan (marriage) dengan klan yang lain. Bagi keluarga politik yang lebih dominan, hal ini akan memastikan keberlangsungan keluarga politik yang lebih lemah (Garzon, 2002). Model kedua adalah quasi-familisme yang menurut Park (2009) berakar pada sikap kasih sayang dan solidaritas dari anggota keluarga dalam hierarki kekuasaan. Maksud dari afeksi di sini adalah tidak dipahami sebagai kasih sayang, melainkan sebagai bentuk orientasi politik keluarga yang didasarkan pada regionalisme, lingkungan, atau bahkan tribalisme yang sama dengan keluarga itu (Park, 2009).

Model ketiga adalah egoisme-familisme, yang dalam konteks dinasti politik ini menurut Park (2009) berakar pada pemenuhan aspek fungsionalisme alih-alih sekadar mengikuti garis keturunan atau hubungan darah. Egoisme para kepala daerah pada dasarnya sejalan dengan konsep teori sebelumnya yaitu kecenderungan untuk mengutamakan keluarga daripada kepentingan publik dalam penempatan jabatan politik atau peralihan kekuasaan. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam kajian ini adalah “Politik Dinasti di Negara Demokrasi,” yang diteliti oleh Ruri Maidany dan tim. Mereka menyatakan bahwa strategi politik dinasti digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempati posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan (formal) maupun proyek dan usaha (informal) oleh keluarga atau kerabat (Maidany, 2024).

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Winda Roselina Effendi dengan judul “Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal: Studi Kasus Dinasti Kota Banten” mengungkapkan bahwa familisme telah membentuk diri menjadi dinasti politik guna mempertahankan kelangsungan kekuasaan dan sepenuhnya mengatur suara masyarakat (Effendi, 2018). Selanjutnya, studi ketiga yang berjudul “Pilkada Serentak 2024: Analisis Polarisasi, Kompetisi, dan Fenomena Kejutan di Provinsi Banten” ditulis oleh Yusa Djuyandi dan teman-teman. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Andra Soni dalam Pilgub Banten dapat menunjukkan bahwa elemen lain seperti kekuatan jaringan politik, efektivitas kampanye, dan perubahan preferensi pemilih memiliki peran yang signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa politik di Banten menjadi semakin kompetitif dan tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh yang cuma mengandalkan popularitas nama (Djuyandi, 2024).

C. METODE (bold 12 pt)

Studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena politik dinasti dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Pendekatan ini diambil karena persoalan politik dinasti tidak hanya bisa dijelaskan dengan data statistik, tetapi juga memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-

faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang mendukung kelangsungannya (Moleong, 2019).

Penelitian kualitatif yang digabungkan dengan studi kasus digunakan untuk menganalisis praktik dinasti politik di Provinsi Banten yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah serta Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Achmad Dimyati Natakusumah. Pemilihan kedua kawasan ini didasarkan pada ciri khasnya, yaitu adanya dinasti politik yang berkuasa dan berpengaruh dalam persaingan politik setempat. Studi kasus dianggap penting karena menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika politik yang terjadi di suatu daerah dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya (Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara utama, yang pertama adalah melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu politik dinasti. Kedua, survei pendapat publik yang dilaksanakan secara terbatas untuk mengevaluasi pandangan masyarakat mengenai dampak dinasti politik terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi, dan perkembangan politik di tingkat lokal. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan inferensi. Data hasil studi literatur dianalisis dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber guna mengidentifikasi pola dan tema utama. Sementara itu, data survei dianalisis dengan cara deskriptif melalui penyajian dalam format tabel atau grafik sederhana untuk mendukung temuan kualitatif. Keabsahan data yang diuji melalui teknik triangulasi baik dari sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapat dari literatur akademik dan dokumen resmi. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil analisis kualitatif dengan data kuantitatif dari survei untuk mencapai kesimpulan yang lebih lengkap dan sah (Denzin, 2017).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dinasti politik muncul akibat 2 (dua) indikator yang dapat dianalisis dari dua fenomena, seperti yang dijelaskan oleh Wasisto (2013). Pertama, terhambatnya proses kaderisasi partai politik dalam mencari calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menimbulkan pragmatisme politik yang mendorong kerabat kepala daerah untuk menduduki posisi publik. Kedua, komunitas yang berperan menjaga status quo di wilayahnya untuk berkuasa dengan cara mendorong anggota keluarga atau orang terdekat kepala daerah untuk menggantikan yang menjabat.

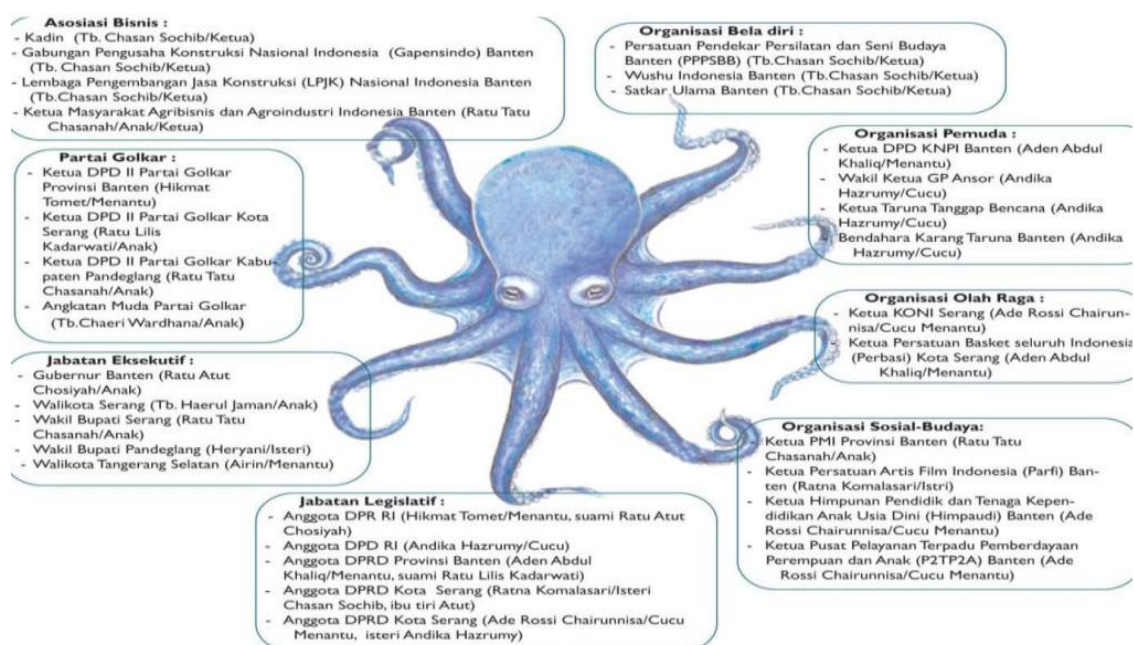
Di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, tanda-tanda dinasti politik tampak lebih nyata. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten. Keluarga besarnya terdiri dari setidaknya 9 (sembilan) orang yang memimpin di masing-masing “kerajaannya” dengan dirinya sebagai pemimpin Banten, suaminya menjabat anggota DPR RI, anaknya sebagai anggota DPD RI, menantunya sebagai anggota DPRD Kota Serang, adiknya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, bahkan adik tirinya sebagai Wakil Walikota Serang, ibu tirinya yang satu lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten, ibu tirinya yang lainnya sebagai anggota DPRD Kota Serang, dan adik iparnya Airin menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan.

Peta kekuatan politik yang dibentuk oleh Tubagus Chasan Sohib lalu dilanjutkan oleh Ratu Atut Chosiyah menciptakan dinasti politik yang berlangsung secara generasional, tanpa memperhatikan latar belakang keluarga. Model familisme yang diterapkan tidak hanya terbatas pada kekuatan politik berbasis keluarga, tetapi juga mencakup solidaritas yang mendukung pelanggaran kekuasaan dengan mengutamakan hubungan kekeluargaan, yang berarti juga menerapkan model quasi-familisme.

Tubagus Chasan Sohib berperan penting dalam pembentukan dinasti politik di Banten, dalam perjalanan sejarahnya Chasan Sohib menjalin hubungan baik dan dekat

dengan perwira militer serta pemimpin Golkar di Banten—statusnya sebagai penguasa lokal di Banten di masa lalu selalu didukung oleh nasib baik, sehingga hal tersebut berlanjut hingga ia menjadi penggerak utama dalam pembentukan Provinsi Banten.

Adapun gambaran dinasti politik Tubagus Chasan Sohib yang dilanjutkan oleh Ratu Atut Chosiyah, yang telah menempati posisi-posisi strategis dari organisasi olahraga sampai pada jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif;



Gambar 1. Dinasti Politik Banten

Dalam organisasi Partai Golkar Provinsi Banten, posisi penting juga diisi oleh jiwa politik Chasan Sohib yang mencakup menantunya Hikmat Tomet sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, anaknya Ratu Lilis Kadarwati menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, anaknya Ratu Tatu Chasanah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pandeglang, dan anaknya Tubagus Chaeri Wardhana sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Banten (Effendi, 2018).

Selanjutnya dalam posisi eksekutif dijabat oleh anaknya Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode, Tubagus Haerul Jaman, anaknya, menjabat sebagai Walikota Serang, Ratu Tatu Chasanah, juga anaknya, menjabat sebagai Wakil Bupati Serang, Heryani, istri Chasan Sohib, menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang, dan Airin Rachmi Diany, menantunya, menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan. Selanjutnya pada level legislatif, Hikmat Tomet menjabat sebagai Anggota DPR RI, Andika Hazrumy menjadi Anggota DPD RI, Aden Abdul Khaliq yang adalah suami Ratu Lilis Kadarwati menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ratna Komalasari yang merupakan istri kedua Chasan Sohib menjadi Anggota DPRD Kota Serang, dan Ade Rossi Chairunnisa yang merupakan istri Andika Hazrumy menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Serang.

Posisi tersebut dipertahankan hingga tahun 2020-an, ketika anaknya Ratu Atut Chosiyah, pada periode 2017-2022, Andika Hazrumy menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim. Selanjutnya, istri Tubagus Chaeri Wardana, Airin Rachmi Diany, menjabat sebagai Anggota DPR RI untuk Dapil III Tangerang Raya dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya, Pilar Saga Ichsan, anak dari Ratu Tatu Chasanah, terpilih sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan mendampingi Benyamin Davnie sejak tahun 2020 hingga sekarang (Effendi, 2018). Benyamin Davnie adalah Wakil Walikota yang menjabat mendampingi Airin Rachmi Diany selama 2 (dua) periode dari tahun 2011 sampai

2021. Dengan kata lain, Dinasti Ratu Atut telah merajalela selama puluhan tahun sejak pembentukan Provinsi Banten hingga sekarang. Namun, Airin Rachmi Diany gagal dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten pada tahun 2024, meskipun merupakan penerus trah kekuasaan Ratu Atut sebagai Adik Ipar—situasi ini tidak membuat langkah Airin untuk menjadi Gubernur Banten menjadi mudah.

Pemilukada Banten 2024: Dinasti Ratu Atut vs Klan Natakusumah

Pemilukada Banten pada tahun 2024, menampilkan 2 (dua) pasangan calon yaitu Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi yang didukung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan, melawan Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah yang didukung oleh sebagian besar partai politik di Banten dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Kontestasi ini menjadi taruhan bagi Airin dalam usaha menjaga keberlanjutan trah Ratu Atut di ranah eksekutif, di mana sebelumnya Andika Hazrumy, sebagai keponakan Airin, sukses menjabat sebagai Wakil Gubernur.

Pilgub Banten 2024 menjadi kesempatan bagi klan Natakusumah untuk mendekati masyarakat Banten yang selama ini dikuasai oleh Dinasti Ratu Atut. Airin yang mewakili kelompok Ratu Atut atau Tubagus Chassan Sohib sempat tidak didukung Partai Golkar untuk maju di pilkada Banten, namun pada 26 Agustus 2024, Golkar justru mengusung Andra Soni dan Achmad Dimiyati. Keputusan tersebut diambil oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pengurus DPP Partai Golkar dan Golkar Banten menyerahkan rekomendasi ini kepada Pak Cagub, Cawagub. Semoga Allah meridai perjuangan dan bisa memenangkan kompetisi ke depan," kata Bahlil Lahadalia (Nusratu, 2024).



Gambar 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024

Hal itu mendapatkan sambutan baik dari Andra Soni selaku Calon Gubernur yang mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar berpesan agar Provinsi Banten dapat bersinergi dengan pemerintah pusat kedepan. Namun berselang satu hari, keputusan itu berubah dimana Golkar berbalik mengusung Airin Rachmi dan Ade Sumardi pada 27 Agustus 2024. Bahkan Bahlil Lahadalia menegaskan Airin merupakan kader Partai Golkar dan menilai kurang pas apabila tidak menghantarkan Airin berlaga pada Pilgub Banten

"Partai Golkar menyerahkan B1-KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur, yaitu Pak Ade Sumardi" (Sari, 2024).

Sebelumnya Airin juga telah mendekati PDI Perjuangan yang dipandang sebagai upaya strategis untuk mendapatkan dukungan partai besar dalam kontestasi politik di Banten.

Namun, respons Megawati menunjukkan bahwa PDIP memiliki pertimbangan khusus dalam menerima figur politik dari luar partai. Kejadian ini menegaskan bahwa meskipun dinasti politik memiliki pengaruh signifikan, adaptasi dan pendekatan terhadap partai politik lain memerlukan strategi yang tepat dan penerimaan dari pihak yang dituju. Meskipun begitu, Airin mengalami kekalahan atas Andra Soni dan Achmad Dimiyati. Pasangan Airin-Ade mendapatkan 44,12% suara atau setara 2.449.183 pemilih, sedangkan pasangan Andra Soni-Achmad Dimiyati memperoleh 55,88% suara atau setara 3.102.501 pemilih. Klan Natakusumah berhasil mendominasi wilayah kekuasaannya yakni Kabupaten Pandeglang dengan perolehan 67,27% atau 436.660 pemilih. Hampir seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Banten memenangkan pasangan Andra Soni-Achmad Dimiyati, sedangkan Airin-Ade hanya menang di 2 (dua) kota yakni Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

Kemenangan Achmad Dimiyati menjadi tonggak baru politik dinasti di Provinsi Banten, sekaligus mengakhiri trah Ratu Atut pada kekuasaan eksekutif Gubernur dan Wakil Gubernur. Dinamika ini membuat Achmad Dimiyati Natakusumah juga memenangkan adik kandungnya pada kontestasi pemilihan Bupati Pandeglang, sebelumnya bupati Pandeglang diisi oleh istrinya yaitu Irna Narulita. Achmad Dimiyati Natakusumah merupakan Bupati Pandeglang pada tahun 2000-2009 juga seorang pengusaha sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya Achmad Dimiyati adalah politisi PPP. Akhirnya pindah sejak tahun 2018, Dimiyati mengungkapkan bahwa PKS adalah Partai yang mirip dengan PPP yang berkomitmen pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

“PKS itu mirip dengan PPP dulu, yang komit dengan dakwah dan keumatan serta bela Islam. Yang punya prinsip amar makruf nahi mungkar. Saya sangat terpicat dengan visi-misi PKS tersebut” (Putri, 2017).

Berbeda dengan suaminya, Irna Narulita telah beberapa kali pindah partai, sebelumnya bersama dengan suami di PPP sampai tahun 2017, kemudian berpindah ke Partai Demokrat, lalu maju Bupati bersama dengan PDI Perjuangan hingga akhir tahun 2024, kemudian akhirnya pindah berkartu anggota PAN pada tahun 2025. Sementara itu adik dari Dimiyati Natakusumah, yaitu Dewi Setiani menjadi kader Partai Gerindra dan maju sebagai Bupati Pandeglang pada Pilkada tahun 2024 atas usungan partai berlogo Garuda tersebut.

Selanjutnya anak Achmad Dimiyati, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI adalah Rizki Aulia Rahman Natakusumah yang maju sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Uniknya Dimiyati bersama Rizki Aulia pernah berada di 1 (satu) Daerah Pemilihan yakni Banten I, Achmad Dimiyati mencalonkan diri dari PKS dan Rizki Aulia dari Partai Demokrat. Pada Pemilu 2019, keduanya berhasil menduduki kursi DPR RI di Daerah Pemilihan yang sama; Ahmad Dimiyati memperoleh 67.150 suara dan Rizki Aulia mendapatkan 56.123 suara (KPU Provinsi Banten, 2019). Praktik politik dinasti antara klan Natakusumah dan klan Ratu Atut memperlihatkan perbedaan yang jelas, yaitu arah ideologi partai politik. Seluruh keluarga Ratu Atut merupakan anggota Partai Golkar dan meraih kekuasaan melalui partai tersebut, sementara klan Natakusumah cenderung acuh tak acuh terhadap prinsip-prinsip politik. Ini menunjukkan bahwa klan Natakusumah mengadopsi model egoisme-familisme yang menekankan pada aspek fungsionalisme, di mana kiai atau abuya Dimiyati berperan sebagai sosok karismatik yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan dinasti politik Natakusumah.

Selanjutnya, klan politik ini kurang menganggap partai politik sebagai arah penting yang harus diikuti oleh keluarganya, tetapi hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan bagi keluarganya. Walaupun klan Ratu Atut juga mengadopsi model egoisme-familisme, namun dinasti ini kokoh karena memiliki arah politik yang telah berkembang di Partai Golkar selama bertahun-tahun. Keberadaan dinasti politik memiliki dampak yang ambigu terhadap kemajuan politik di Indonesia. Di satu sisi, dinasti politik dapat mempertahankan kontinuitas kebijakan dan stabilitas politik di tingkat lokal. Akan tetapi, dominasi keluarga dalam politik

sering kali menghalangi partisipasi masyarakat, di mana sedikitnya kader baru membatasi ruang partisipasi dan memperkuat oligarki kekuasaan. Kedua fenomena dinasti politik itu menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Provinsi Banten masih rendah; di samping budaya patronase dan feodalisme yang masih ada, Banten juga masih sangat dipengaruhi oleh politik identitas yang kuat.

Kekalahan Airin Rachmi Diany menandakan bahwa dinasti Ratu Atut Chosiyah tidak sekuat masa lalu, saat ini klan Dimiyati Natakusumah yang memenangkan Pilkada memiliki peluang besar untuk menguasai dan melakukan perluasan ke berbagai wilayah. Klan Natakusumah saat ini hanya dapat menguasai Kabupaten Pandeglang yang dipimpin oleh Dewi Setiani. Selain itu, Rizki Aulia masih terbilang muda, berusia 30 tahun dan berpotensi menjadi penerus dinasti Natakusumah di Banten.

Asako (2010) dan McCoy (1994) yang menganalisis tumbuhnya dinasti politik justru terjadi karena adanya kolusi bisnis dan politik di tingkat lokal. Dalam hal ini, jejaring keluarga telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian di distribusikan kepada kroni-kroninya. Dinasti politik berperan sebagai patron dalam upaya menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan menempatkan anggota keluarganya ke dalam pemerintahan. Oleh karena itu praktik penjarahan ekonomi berlangsung secara terus menerus karena selalu dilakukan oleh jejaring elit keluarga (Effendi, 2018).

Dinasti politik Ratu Atut yang bergerak sebagai pengontrol moral kemasyarakatan, dimana para aktornya bergerak di berbagai organisasi, seperti Organisasi Bela Diri (Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten, dan Palang Merah Indonesia Provinsi Banten. Sementara Achmad Dimiyati Natakusumah berjejaring ke pesantren-pesantren dengan memperkuat basis kiai, ulama dan santri sebagai basis suaranya di Provinsi Banten. Kehadiran dinasti politik dalam konteks Pemilu, khususnya di Provinsi Banten menunjukkan bahwa Pilgub Banten tahun 2024 merupakan ajang para klan familisme mempertaruhkan kekuasaannya demi melanggengkan kekuasaan atau meraih kekuasaan, guna memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Memungkinkan apabila Airin akan kembali maju pada kontestasi Pilgub tahun 2029 mendatang, sehingga menjadi upaya bagi Airin guna meraih kembali kekuasaan yang sebelumnya diambil oleh Achmad Dimiyati.

E. KESIMPULAN

Fenomena politik dinasti dalam demokrasi lokal di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa dipertahankan melalui mekanisme familisme dan jaringan sosial-politik yang kuat. Dinasti politik Ratu Atut Chosiyah yang terbentuk secara sengaja menunjukkan pola pewarisan kekuasaan yang terencana lewat pembagian kekuasaan kepada anggota keluarga, meskipun terdapat kasus korupsi yang merusak legitimasi dinasti itu. Di sisi lain, dinasti politik Achmad Dimiyati Natakusumah yang berlandaskan pada aspek religius dan klientelisme menunjukkan model *by accident* yang secara bertahap namun tetap konsisten memperluas kekuasaan politik keluarganya di Pandeglang, sampai ke tingkat Provinsi. Kedua dinasti ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Banten beroperasi dalam kerangka persaingan yang terbatas, di mana kontestasi politik lebih didominasi oleh keluarga tertentu daripada kemunculan kader-kader baru yang sepenuhnya berasal dari partisipasi masyarakat.

Dinasti politik terbukti memiliki dampak ganda, di satu pihak menciptakan stabilitas kekuasaan dan kelanjutan kebijakan, tetapi di pihak lain menghalangi regenerasi politik dan membatasi ruang demokrasi yang inklusif. Kontestasi Pilkada Banten 2024 mengindikasikan bahwa politik dinasti bukanlah kekuasaan tunggal yang absolut, melainkan sebuah arena persaingan antar-dinasti yang selalu berubah mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dengan demikian, keberlanjutan politik dinasti menjadi tantangan berat bagi

pembangunan politik di Indonesia, khususnya dalam menjamin kualitas demokrasi lokal yang lebih terbuka dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142.
- Djati, W. R. (2014). Revivalisme kekuatan familisme dalam Demokrasi: dinasti politik di aras lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(2), 72-100.
- Djuyandi, Y., Rahayu, L. F., & Asnawi, A. (2024). Pilkada Serentak 2024: Analisis Polarisasi, Kompetisi, dan Fenomena Kejutan di Provinsi Banten. *Journal Politics and Government*, 1(2), 211-221.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.
- Garzon, A. (2002). *Familism*. New York: MacMillan.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- Hikmawan, M. D., Godjali, M. R., & Indriyany, I. A. (2021). Kiai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten. *Politika*, 12(1), 89.
- Hutajuju, M. A. (2024). *Survei Litbang Kompas Pilgub Banten: Airin 38,3%, Wahidin Halim 18,1%*. Retrieved from: <https://news.detik.com/pemilu/d-7443422/survei-litbang-kompas-pilgub-banten-airin-38-3-wahidin-halim-18-1>
- Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1), 37.
- KPU Provinsi Banten. (2019). *DC1 Hasil: Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*. Banten: KPU Provinsi Banten.
- Maidany, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., & Harahap, N. (2024). Politik Dinasti Di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 95.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nusratu, H. (2024). *Golkar Resmi Usung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten*. Retrieved from: <https://news.detik.com/pilkada/d-7508550/golkar-resmi-usung-andra-soni-dimyati-di-pilgub-banten>
- Park, T. H. (2004). The influences of familism on interpersonal trust of Korean public officials. *International Review of Public Administration*, 9(1), 121-135.
- Putri, P. K. (2017). *Dimyati Natakusumah Pindah ke PKS*. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-3789400/dimyati-natakusumah-pindah-ke-pks>
- Sari, B. B. (2024). *Resmi, Golkar Kini Usung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten*. Retrieved from: <https://news.detik.com/pilkada/d-7510606/resmi-golkar-kini-usung-airin-rachmi-diany-ade-sumardi-di-pilgub-banten>

- The Jakarta Post. (2017). *Ratu Atut gets 5.5 years for another graft conviction*. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/amp/news/2017/07/20/ratu-atut-gets-5-5-years-for-another-graft-conviction.html>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.